

**DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016)**

Ferina Intan Lutfia
ferinaupi@gmail.com

Maryono*
maryono@edu.unisbank.ac.id

Batara Daniel Bagana
batara@edu.unisbank.ac.id
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh realisasi pendapatan, ukuran pemerintah daerah, jumlah unit di bawah daerah (SKPD), kehidupan pemerintah daerah, ukuran badan legislatif, dan pendapatan antar pemerintah pada tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014-2016 yang telah diaudit oleh BPK. Sampel yang digunakan adalah 105 laporan keuangan pemerintah daerah semua populasi sampel. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda oleh SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan, jumlah unit di bawah daerah (SKPD), dan rasio swasembada memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan ukuran variabel pemerintah daerah, kehidupan pemerintah daerah, pendapatan antar pemerintah, dan ukuran legislatif tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.

Kata kunci: tingkat pengungkapan lkp, realisasi pendapatan, jumlah unit di bawah daerah (skpd), ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, usia pemerintah daerah, ukuran badan legislatif, dan pendapatan antar pemerintah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the realized of revenue, size of local government, number of units under regional (SKPD), the life of the local government, the size of the legislature, and the intergovernmental revenue on the level of disclosure LKPD Regency / City in Central Java province. The study population was District / City of Central Java Province during the years 2014-2016 that have been audited by the BPK. The sample used is 105 local government financial statements are all the population sampled. This research data analysis methods using the multiple linear regression analysis by SPSS 19. The results showed that realized of revenue, number of units under regional (SKPD), and the ratio of self-sufficiency have significant effect on the level of disclosure LKPD. While variable size of local government, the life of local governments, intergovernmental revenue, and a legislative measure does not affect the level of disclosure LKPD.

Keywords: *level of disclosure lkp, realized of revenue, number of units under regional (skpd), local government size, ratio independence, local government age, size of the legislature, and the intergovernmental revenue*

PENDAHULUAN

Reformasi akuntansi dalam sektor publik terutama di pemerintahan telah dicanangkan sejak tahun 2000 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kas menuju akreal. Kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

berbasis akreal, dengan begitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Salah satu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Suatu standar akuntansi diperlukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan *mandatory disclosure* yaitu dengan membandingkan antara pengungkapan dalam LKPD dengan yang seharusnya diungkapkan dalam SAP sehingga lebih mengukur ketaatan dibandingkan dengan pengungkapan. Pentingnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu pada tahun 2016 jumlah Pemerintah Daerah (pemda) pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang telah diperiksa oleh BPK dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 30 pemda, atau sebesar 88,57%. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 28,57%. Sementara itu sisanya sebanyak 5 (lima) pemda masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penelitian yang terkait dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah daerah dan program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan daerah dalam

mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dalam penelitian Mira et al (2015) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, hasil berbeda di dapat dalam penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pemerintah daerah dijalankan oleh entitas pelaporan yang disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Maulana dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda juga dilakukan oleh Mira et al (2015) yang menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan seberapa besar suatu pemerintahan tersebut. Ukuran Pemerintah Daerah diproksi dengan total aset memiliki kemungkinan dalam upaya mewujudkan tanggungjawab melalui adanya pengungkapan yang lebih besar atas ukuran daerah yang besar. Dalam penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Kontradiksi terjadi pada penelitian Maulana dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang sama dilakukan pada penelitian Susbiyani (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya rasio kemandirian dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam penelitian Girsang dan Yuyetta (2015) menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda terjadi pada penelitian Susbiyani (2015) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama pemerintah daerah ada (Girsang dan Yuyetta, 2015). Untuk penelitian umur pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) serta penelitian Waliyyani dan Mahmud (2015) menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda terjadi pada penelitian Girsang dan Yuyetta (2015) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada penelitian Khasanah dan Rahardjo menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda terjadi pada penelitian Maulana dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Kontradiksi terjadi pada penelitian Mira et al (2015) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD adalah *Intergovernmental Revenue*. *Intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Dalam penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda terjadi pada penelitian Girsang dan Yuyetta (2015) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Kontradiksi terjadi pada penelitian Mira et al (2015) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship* dalam Pemerintahan

Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara prinsipal dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Khasanah, 2014).

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran ini sebagai upaya dalam mengaktualisasi diri sebagai aparat pemerintah yang patuh dan upaya dalam mendapat kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat diwujudkan diantaranya melalui kualitas penyajian yang baik dan pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangannya sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Motif pelaporan dilakukan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan sektor publik, khususnya pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengungkapan wajib mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam Kerangka Konseptual SAP disebutkan bahwa pengungkapan lengkap (*full disclosure*) adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Dimana pajak daerah dan retribusi berasal dari masyarakat. Sehingga berdasarkan teori *stewardship* maka pemerintah daerah berusaha untuk menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan daerah yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga dapat meningkatkan pengungkapan yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Mira et al (2015) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan teori *stewardship*, semakin banyak jumlah SKPD maka semakin banyak *steward* yang akan menjalankan pemerintahan dan memberikan informasi pertanggungjawaban kepada *principal*. Sehingga semakin banyak jumlah SKPD dalam pemerintah daerah akan semakin banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia terkait pengungkapan maka dapat meningkatkan pengungkapan menjadi lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Mira et al (2015) menunjukkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H₂: Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Ukuran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangannya. Berdasarkan teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai

steward akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan pemerintahan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *principal*. Maka dalam hal tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah akan dilaksanakan pemerintah daerah secara akuntabel dan transparan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan Khasanah dan Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H₃: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi kemandirian daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangannya. Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* mempunyai tanggung jawab kepada *principal* untuk memberikan informasi, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian yang dilakukan Susbiyani (2015) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H₄: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah yaitu tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang

memiliki umur lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah melalui umur administratif seharusnya suatu daerah harus mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran *steward* dengan lebih meyakinkan *principal* bahwa daerah tersebut telah cukup mapan dan berpengalaman, sehingga *principal* akan merespon melalui harapan akan adanya pengungkapan LKPD yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Waliyyani dan Mahmud (2015) menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H₅= Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Ukuran Legislatif

Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan, mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan anggota legislatif (*principal*) sebagai upaya untuk pemerintah daerah (*steward*) melaksanakan tugas yang telah diberikan. Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Hasil penelitian yang dilakukan Maulana dan Handayani (2015) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

H₆: Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue merupakan jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Indonesia, *intergovernmental revenue* dikenal dengan dana perimbangan. Pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat ataupun provinsi akan meminta pengungkapan yang lebih sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana tersebut. Berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah daerah memiliki pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Upaya kesadaran *steward* dalam menjalani tanggungjawabnya yaitu melalui bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mewujudkan kepercayaan publik baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan. Hasil penelitian yang dilakukan Mira et al (2015) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

H₇: Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pada Tahun Anggaran 2014-2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengacu pada PP No.71 Tahun 2010. Dalam pengambilan sampel adalah semua populasi dijadikan sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tingkat Pengungkapan LKPD

Tingkat pengungkapan LKPD dapat dihitung dari perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, rumus tingkat pengungkapan LKPD adalah sebagai berikut:

$$\text{DISCLOSURE} = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam SAP}}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian Mira et al (2015) menggunakan jumlah PAD untuk mengukur variabel PAD karena PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Total PAD}$$

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam penelitian Girsang dan Yuyetta (2015) jumlah SKPD diukur dengan menggunakan seluruh total SKPD yang ada di suatu daerah, penelitian ini menggunakan ukuran seluruh total SKPD untuk mengukur jumlah SKPD di suatu daerah. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur jumlah SKPD adalah sebagai berikut:

$$\text{SKPD} = \text{JUMLAH SKPD}$$

Ukuran Pemerintah Daerah

Pada penelitian Heriningsih dan Ruserlistyani (2013) untuk mengukur ukuran pemerintah dengan menggunakan total aset yang di transformasikan kedalam bentuk natural logaritma. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur ukuran pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

Rasio Kemandirian

Pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam mengukur variabel rasio kemandirian dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah

Mandiri

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer} + \text{Total Kewajiban}} = \text{Umur}$$

Pemerintah Daerah

Umur suatu daerah menunjukkan seberapa lama daerah tersebut telah ada atau berdiri (Khasanah dan Rahardjo, 2014). Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur umur pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

AGE = Umur Pemerintah Daerah

Berdasarkan Hari Jadi Daerah tersebut

Ukuran Legislatif

Pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) ukuran legislatif diproksi dengan banyaknya jumlah anggota DPRD. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur ukuran legislatif adalah sebagai berikut:

ULEG = Jumlah Anggota DPRD

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue adalah jenis

pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam mengukur *intergovernmental revenue* dengan membandingkan jumlah dana perimbangan dengan jumlah pendapatan. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur *intergovernmental revenue* adalah sebagai berikut:

pendapatan transfer dan jumlah kewajiban. Dengan demikian pada penelitian ini, rumus untuk mengukur rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{IRGOV} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Pengungkapan LKPD
- α = Bilangan Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Kekayaan Pemerintah Daerah
- X2 = Jumlah SKPD
- X3 = Ukuran Pemerintah Daerah
- X4 = Rasio Kemandirian
- X5 = Umur Pemerintah Daerah
- X6 = Ukuran Legislatif
- X7 = *Intergovernmental Revenue*
- ε = Error

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016 yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota yang telah diaudit oleh BPK dan mengacu pada PP No.71 Tahun 2010. Berdasarkan populasi tersebut, total 105 LKPD yang dijadikan sampel karena menggunakan metode semua populasi dijadikan sampel. Berikut ini adalah hasil dari teknik analisa data, yang pertama adalah hasil analisis statistik deskriptif mengenai deskripsi variabel mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SKPD	105	27	55	41,21	7,253
UKURAN PEMDA	105	28,112	30,991	28,75162	,466003
RASIO KEMANDIRIAN	105	,10	,70	,1994	,09342
UMUR PEMDA	105	30	1266	359,97	294,290
UKURAN LEGISLATIF	105	25	50	44,86	6,739
IRGOV	105	,38	,77	,6162	,06385
TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD	105	,472	,660	,58049	,042869
LNPAD	105	25,69	28,03	26,2751	,38527

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan LKPD. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat pengungkapan LKPD adalah sebesar 0,58049. Nilai tingkat pengungkapan LKPD terendah (minimum) sebesar 0,472 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan nilai tingkat pengungkapan LKPD tertinggi (maksimum) sebesar 0,660 terdapat pada Pemerintah Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kabupaten Temanggung. Nilai standar deviasi sebesar 0,042869.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,2751. Nilai PAD terendah (minimum) sebesar 25,69 terdapat pada pemerintah Kota Pekalongan dan nilai PAD tertinggi (maksimum) sebesar 28,03 terdapat pada pemerintah Kota Semarang. Nilai standar deviasi sebesar 0,38527.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata SKPD sebesar

41,21. Nilai SKPD terendah (minimum) sebesar 27 terdapat pada pemerintah Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 55 terdapat pada pemerintah Kabupaten Wonogiri. Nilai standar deviasi sebesar 7,253.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata ukuran pemerintah daerah sebesar 28,75162. Nilai ukuran pemerintah daerah terendah (minimum) sebesar 28,112 terdapat pada pemerintah Kabupaten Wonosobo dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 30,991 terdapat pada pemerintah Kota Semarang. Nilai standar deviasi sebesar 0,466003.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 0,1994. Nilai rasio kemandirian terendah (minimum) sebesar 0,10 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan nilai rasio kemandirian tertinggi (maksimum) sebesar 0,70 terdapat pada Pemerintah Kota Semarang. Nilai standar deviasi sebesar 0,09342.

Tabel 2 Uji Normalitas

	N	Skewness Std.	Kurtosis Std.
	Statistic	Statistic Error	Statistic Error
Unstandardized Residual	105	-,244 ,236	-,226 ,467

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata umur pemerintah daerah sebesar 359,97. Nilai umur pemerintah daerah termuda (minimum) adalah 30 tahun terdapat pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan nilai umur pemerintah daerah tertua (maksimum) adalah 1266 terdapat pada Pemerintah Kota Salatiga. Nilai standar deviasi sebesar 294,290.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata ukuran legislatif sebesar 44,86. Jumlah anggota DPRD terendah (minimum) sebesar 25 DPRD terdapat pada Pemerintah Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan jumlah anggota DPRD tertinggi (maksimum) sebesar 50 DPRD terdapat pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Nilai standar deviasi sebesar 6,739.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata *intergovernmental revenue* sebesar 0,61615. Nilai

intergovernmental revenue terendah (minimum) sebesar 0,38 terdapat pada Pemerintah Kota Semarang dan nilai *intergovernmental revenue* tertinggi (maksimum) sebesar 0,77 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Grobogan. Nilai standar deviasi sebesar 0,063853.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari suatu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Skewness- Kurtosis*.

Berdasarkan uji normalitas, nilai *skewness* dan *kurtosis* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Z_{skew} = \frac{-0,244}{\sqrt{\left(\frac{6}{105}\right)}} = -1,020$$

$$Z_{kurt} = \frac{-0,226}{\sqrt{\left(\frac{24}{105}\right)}} = -0,473$$

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai *skewness* sebesar $-1,020 < \pm 1,96$ dan nilai *kurtosis* sebesar $-0,473 < \pm 1,96$ sehingga data dikatakan terdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Tabel 3
Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	T	Sig
(Constant)	-1,515	-2,111	,037
PAD	,076	2,675	,009*
Jumlah SKPD	-,002	-2,749	,007*
Ukuran Pemerintah Daerah	,013	,842	,402
Rasio Kemandirian	-,276	-2,088	,039*
Umur Pemerintah Daerah	4,178E-6	,265	,791
Ukuran Legislatif	-,002	-1,422	,158
<i>Intergovernmental Revenue</i>	-,018	-,216	,829
<i>R Square</i>	0,150		
<i>Adjusted R Square</i>	0,088		
<i>F-Statistic</i>	2,438		
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,024		
<i>Durbin Watson Stat</i>	1,830		

*

Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,088 yang berarti bahwa 8,8% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 91,2% dijelaskan oleh variabel lain. Sementara itu nilai Fhitung sebesar 2,438 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,10, kemudian nilai probabilitas sebesar 0,024 jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengungkapan LKPD atau dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan intergovernmental revenue secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pengujian Hipotesis Satu

Pada pengujian variabel PAD menunjukkan nilai t sebesar 2,675 sedangkan nilai sig sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari tingkat sig 0,05 sehingga PAD

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 1 yang menyatakan

pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah terbukti, sehingga **H₁ diterima**.

Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar maka dikatakan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah besar. Semakin besar kontribusi masyarakat atas PAD melalui pajak dan retribusi akan diikuti dengan kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan PAD. Sehingga semakin besar PAD maka kecenderungan pemerintah daerah dalam melaporkan keuangannya juga semakin tinggi, tujuannya supaya masyarakat dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah saat ini dan juga mengetahui bagaimana PAD tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik.

Pengujian Hipotesis Dua

Pada pengujian variabel jumlah SKPD menunjukkan nilai t sebesar -2,749 sedangkan nilai sig sebesar 0,007 yang berarti lebih kecil

dari tingkat sig 0,05 sehingga jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 2 yang menyatakan jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₂ ditolak**.

Pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang sedikit maka kompleksitas semakin menurun sehingga pengungkapan menjadi lebih baik. Prinsip kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas juga menjelaskan bahwa dengan jumlah SKPD yang lebih sedikit, maka urusan pemerintah menjadi lebih mampu untuk dikontrol dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dampaknya hasil pengungkapan menjadi lebih baik.

Pengujian Hipotesis Tiga

Pada pengujian variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 0,842 sedangkan nilai sig sebesar 0,402 yang berarti lebih besar dari tingkat sig 0,05 sehingga ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 3 yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₃ ditolak**.

Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan total aset besar cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari BPK. Namun daerah seringkali tidak memiliki informasi cukup terkait dengan permasalahan yang dihadapi (Waliyyani dan Mahmud, 2015).

Pengujian Hipotesis Empat

Pada pengujian variabel rasio kemandirian menunjukkan nilai t sebesar -2,088 sedangkan nilai sig sebesar 0,039 yang berarti lebih kecil dari tingkat sig 0,05 sehingga rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 4 yang menyatakan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₄ ditolak**.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada besarnya tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas LKPD dari pihak eksternal.

Pengujian Hipotesis Lima

Pada pengujian variabel umur pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 0,265 sedangkan nilai sig sebesar 0,791 yang berarti lebih besar dari tingkat sig 0,05 sehingga umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 5 yang menyatakan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₅ ditolak**.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada umur pemerintah daerah karena adanya sifat monoton dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan merupakan ilmu yang berkembang dinamis, sehingga tidak menjamin bahwa pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua akan dapat menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik, jika tidak ditunjang dengan kemauan dan kemampuan pemerintahnya.

Pengujian Hipotesis Enam

Pada pengujian variabel ukuran legislatif menunjukkan nilai t sebesar -1,422 sedangkan nilai sig sebesar 0,158 yang berarti lebih besar dari tingkat sig 0,05 sehingga ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 6 yang menyatakan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₆ ditolak**.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada banyaknya jumlah anggota DPRD karena pengawasan pada laporan keuangan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jumlah anggota DPRD yang banyak tidak diikuti adanya fungsi pengawasan dan peran yang semakin baik berdampak pada penurunan kinerja atas tingkat pengungkapan LKPD. Adanya isu tentang korupsi yang dilakukan anggota DPRD turut menyumbang alasan atas penurunan kinerja pemerintah.

Pengujian Hipotesis Tujuh

Pada pengujian variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai t sebesar -0,216 sedangkan nilai sig sebesar 0,829 yang berarti lebih besar dari tingkat sig 0,05 sehingga *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD maka hipotesis 7 yang menyatakan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD adalah tidak terbukti, sehingga **H₇ ditolak**.

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tidak bergantung pada besarnya *intergovernmental revenue* karena pemerintah pusat selama ini kurang memberikan kontrol terhadap penggunaan dana transfer sehingga pemerintah daerah tidak terdorong untuk meningkatkan pengungkapan LKPD. Jika dalam menentukan anggaran dana transfer di daerah tidak dimonitoring, maka tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan kualitas laporan keuangannya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah,

Ukuran Legislatif dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran-saran yang harus diperhatikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data LKPD terbaru dan periode waktu yang lebih panjang sehingga lebih kelihatan perkembangan tingkat pengungkapan LKPD terutama di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arik, S. 2015. “Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia”. **Topik Manajemen Keuangan**, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Antin, O. 2015. “Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah)”. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*, Vol. 2 No. 4.
- Asyrofi, M.Z. dan D. Ratmono. 2016. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Pada LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2014)”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 5 No. 3, Hal. 1-11.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. <http://semarang.bpk.go.id/>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2017.
- Candra, M. dan Bestari, D, H. 2015. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD”. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Faud, Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghaniyyu, M, K. dan Amir, M. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Girsang dan Yuyetta. 2015. “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 4. Universitas Diponegoro.
- Heriningsih, S dan Rusherlistyani. 2013. “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 02. UPN Yogyakarta.
- Hilmi, A. Z. dan D. Martani. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.” *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Intan, C. dan Maryono. 2017 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi” *Students Journal of Accounting and Banking*, Vol. 6, No. 1. Universitas Stikubank Semarang.
- Intan, Cristiana. 2017. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi”. *Skripsi Sarjana*. Universitas Stikubank Semarang.
- Kadek, A, D, P.; Desak, N, S, W; dan Edy, S. 2015. “Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)”. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1.
- Khasanah, N.L. dan S.N. Rahardjo. 2014. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3 No. 3, Hal. 1-11.
- Khasanah, N, L. 2014. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Skripsi Sarjana*. Universitas Diponegoro.
- Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 19 Oktober 2017. *Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Daerah Terbesar*.
- Lilis, S. 2016. “Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No.1.
- Maulana, C dan Handayani, B.D. 2015. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD” *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Mira, F; Hermanto; dan N. K. Suransi. 2015. “Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada

- Kabupaten/Kota Di Provinsi Busa Tenggara Barat)”. **Jurnal Infestasi**, Vol. 11, No. 2, Hal 171-185. Universitas Mataram.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta. 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta. 2011.
- Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ratmono dan Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ririn, H. dan A. Tahar. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22-23
- Riswanda, I. dan Agus, W. 2014. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012”. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Setyaningrum, Dyah. dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia**, Vol. 9, No. 2, Desember 2012 154-170
- Sugiyono. 2007. “Statistika Untuk Penelitian”. Bandung : Alfabeta.
- Suhardjanto, D. dan S.I. Lesmana. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia”. **Jurnal STIE Bank BPD Jateng** Vol. 6 No. 2, Surakarta.
- Syafitri, Febriyani. 2012. “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. *Skripsi Sarjana*. Universitas Indonesia.
- UU RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- UU RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- UU RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UURI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.